

# **Marxisme setelah Posmodernisme: Memikirkan Ulang Subjek Politis Emansipatoris**

**Dani Filc dan Uri Ram**

Universitas Ben-Gurion Negev, Israel

Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dwi Platomo

Disunting oleh Muhammad Al-Fayyadl

## **Abstrak**

Konsep mengenai suatu subjek sosial-historis-politik emansipatoris, yang sentral dalam Marxisme, telah diserang oleh teori-teori posmodern. Dalam artikel ini penulis meneliti perjumpaan antara teori-teori Marxis dan posmodern dan merenungkan apa dan bagaimana cara memahami suatu subjek politis emansipatoris. Artikel ini mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam berbagai protes di seluruh dunia dalam konteks krisis ekonomi global dan menggambarkan sebuah tipologi atas berbagai tanggapan yang berbeda dari para pemikir Marxis terhadap tantangan posmodern. Kami membedakan antara “penolakan total” (Marxisme anti-posmodern) dan “penerimaan total” (pos-Marxisme), dan antara “penolakan sebagian” (posmodernisme Marxis) dan “penerimaan sebagian” (posmodernisme Marxis sintetis). Berdasarkan tipologi ini, kami mendiskusikan pendekatan-pendekatan berbeda atas persoalan subjek emansipatoris. Para Marxis anti-posmodern telah membuat adaptasi yang relatif kecil terhadap perdebatan bahwa kelas merupakan konsep penjelas yang sentral. Para posmodernis Marxis mempertahankan kategori-kategori Marxis utama, tetapi mereka juga mengkonseptualisasikan perjuangan-perjuangan baru serta subjektivitas-subjektivitas politis baru. Para posmodernis Marxis sintetis melihat subjektivitas politik sebagai suatu perpaduan dari kategori-kategori Marxis dan kategori-kategori budaya dan identitas. Para pos-Marxis mendekonstruksi konsep kelas dan mengajukan subjektivitas-subjektivitas kolektif baru. Akhirnya, artikel ini mendiskusikan keterbatasan setiap pendekatan dalam menempatkan identitas subjek emansipatoris.

## **Kata Kunci**

Kelas, Marxisme, pos-Marxisme, posmodernisme, subjek

## **Pendahuluan: Marxisme, posmodernisme, dan *zeitgeist* sejak 1980-an**

Apakah ada suatu konsep subjek emansipatoris yang relevan bagi kondisi struktural dari masyarakat kontemporer, dan bagi pendekatan-pendekatan teoretis utama untuk memahami kondisi ini? Sementara banyak dari pemikiran sosial posmodern menyangkal keabsahan atau relevansi pertanyaan ini, kami menyatakan bahwa pertanyaan ini sendiri masih valid. Kemunculan suatu gelombang demokratis dan gerakan-gerakan protes anti-

neoliberal di seluruh dunia – dari dunia Arab, melalui Eropa dan Amerika Serikat, sampai Amerika Latin – menegaskan keabsahannya. Gelombang ini menekankan perlunya berpikir dalam kerangka aksi emansipatoris kolektif (memahami emansipasi bukan sebagai pencapaian dari tujuan sempurna dan final, tetapi sebagai perkembangan yang terus berjalan dari apa yang disebut oleh Étienne Balibar sebagai *égaliberté*). Ini bukanlah Subjek dengan huruf kapital, baik sebagai agen sejarah dan sumber “pengetahuan hakiki”, tetapi subjek sebagai suatu agen kolektif.

Dalam teori Marxis, kelas pekerja adalah subjek sosial-historis dan politis, kelas di mana kepentingan objektif dan kesadaran subjektif hadir bersama untuk menggerakkan sejarah menuju emansipasi.<sup>1</sup> Tetapi, sulit untuk membayangkan suatu subjek seperti itu dalam konteks posmodernitas dan pos-Fordisme. Posmodernitas menyatakan dan menegaskan kematian subjek (sosial), akhir sejarah (emansipatoris), dan runtuhnya politik (representatif). Dalam artikel ini, kami meneliti pertemuan antara teori-teori Marxis dan posmodernis yang telah memanas sejak tahun 1980-an dan merenungkan apa dan bagaimana cara memahami suatu subjek politis emansipatoris.

Teori Marxis memperoleh kembali relevansinya di lingkaran intelektual Barat pada tahun 1968, setelah sebelumnya dipinggirkan dalam masa puncak Perang Dingin (antara 1950-an dan 1960-an). Tetapi, kemunculan kembali ini terganggu selama 1980-an, ketika “kanan baru” memperoleh kekuasaan di negara-negara besar di Barat (misalnya Reagan di AS, Thatcher di Inggris, dan Kohl di Jerman). *Zeitgeist* di negara-negara “Utara” beralih kepada ekonomi-politik neoliberal dan teori budaya posmodern. Bahkan dalam kasus ketika partai-partai kiri-tengah kembali berkuasa (Clinton di AS, 1993-2001, Blair di Inggris, 1997-2007, dan Mitterrand di Prancis, 1981-1995), jelas bahwa kesuksesan elektoral mereka secara praktis tergantung pada kerjasama mereka dengan hegemoni neoliberal.

Keruntuhan Uni-Soviet pada 1989 adalah pukulan lain terhadap status teori Marxis (terlepas bahwa dalam pemikiran Barat, teori tersebut terpisah dari rezim ini atau bahkan bertentangan terhadapnya). Kemenangan historis dari AS dalam Perang Dingin tampaknya memukulkan paku terakhir kepada peti mati rezim sosialis dan teori-teori Marxis yang dihubungkan dengannya. Tesis (kapitalis) mengenai “akhir sejarah” menandai *zeitgeist* 1990-an (Fukuyama, 1992).

Bagaimanapun, kapitalisme yang tak terkalahkan dikejutkan dan ditantang, di awal dari dekade berikutnya, oleh serangan Al-Qaidah atas AS. *Zeitgeist* dekade pertama dari milenium ketiga kemudian ditandai oleh tesis “pertarungan antar-peradaban” (Huntington, 1993). Sekali lagi, Marxisme, dengan keabaian inherennya atas etnisitas atau nasionalisme serta sikap materialis-progresif-nya, tidak begitu menjanjikan sebagai suatu posisi yang lebih baik bagi analisis “pertarungan” ini.

Beberapa proses struktural lainnya yang berhubungan dengan pos-Fordisme juga berkontribusi bagi apa yang tampaknya menjadi suatu krisis terakhir teori Marxis (Amin, 1994; Boyer, 2000; Hall, 1991; Hirsh, 1988; Jessop, 2002). Hal-hal itu adalah keruntuhan proletariat industri dari negara-negara Barat, kemunculan bentuk-bentuk baru dari aksi sosiopolitis (yang terkenal sebagai gerakan sosial baru), dan kritik-kritik para feminis dan posstrukturalis terhadap kelas sebagai satu-satunya subjek sosial yang relevan dan mengenai teleologi Marxisme. Di bawah keadaan-keadaan ini, beberapa pemikir sayap kiri secara bersama-sama kehilangan harapan kepada Marxisme dan menyatakan bahwa ia tak relevan; yang lain

menenggelamkan diri mereka dengan keras kepala ke dalam posisi-posisi Marxis lama mereka, dan lainnya berupaya menempatkan diri ke tengah dengan memadukan teori-teori Marxis dan posmodern dalam cara-cara yang baru dan kreatif.

Pada 1988, *Marxism Today* mengumumkan kedatangan “Era Baru” (*New Times*) yang diartikan sebagai suatu “perubahan kualitatif” dalam kehidupan sosial dan kultural, dan menunjuk “pos-Fordisme” sebagai akar penyebabnya. Editorial jurnal ini memperingatkan generasi kiri tua dan para Marxis bahwa mereka sedang mengerahkan “kavaleri menghadapi tank-tank” (Hall dan Jacques, 1989). Posmodernisme, atau, lebih khusus, posstrukturalisme sebagai suatu filsafat posmodernitas, merupakan suatu komponen vital bagi Era Baru<sup>2</sup>. Ia menantang semua ajaran dasar modernisme dan Marxisme (yang sekarang dilihat sebagai akibat alamiah dari yang awal): kepercayaan kepada kemajuan dan rasionalitas sejarah, kepada “subjek” sebagai suatu agen otonom, dan kepada dapat diketahuinya beberapa fakta. Berlainan dengan ini, posmodernisme menciptakan satu kepercayaan kepada keterputusan sejarah yang membatalkan setiap teleologi atau kemajuan, kepada posisionalitas-posisionalitas yang jamak dan cair yang mencegah pembentukan identitas kolektif yang solid, dan kepada relativitas epistemologis, yang tidak membiarkan adanya “teori besar” (Lyotard, 1979).

Tuduhan terhadap modernisme dan Marxisme berlipat ganda, mencakup fondasionalisme, reduksionisme, objektivisme, universalisme, teleologisme, instrumentalisme, Eurosentrisme, phallosentrisme, dan esensialisme (misalnya, Aronson, 1995). Peralihan besar hadir dalam iklim ideologis dan intelektual. Sampai saat itu, barisan depan di teori sosial telah memisahkan para pemikir kiri (dan Marxis) dari pemikir liberal (dan modernis). Dari 1980-an ke depan, secara kontras, musuh-musuh dari tahun-tahun sebelumnya menemukan diri mereka bertarung secara berdampingan melawan para posmodernis untuk mempertahankan kemajuan, humanisme, dan objektivitas.

Ironisnya, sementara pada 1950-an Marxisme disingkirkan dari akademi Barat karena dianggap terlalu subversif oleh golongan konservatif, di tahun 1980-an ia kehilangan popularitas sekali lagi karena dianggap terlalu konservatif oleh golongan radikal. Perubahan ini terasa dalam ilmu humaniora dan sosial. Kutipan berikut, dari satu penggambaran mengenai bidang studi Timur Tengah, mengilustrasikan atmosfer ini:

Pendekatan Marxian dan ekonomi politik dilihat oleh banyak pihak pada tahun 1980-an sebagai sesuatu yang terlalu sempit, dalam penekanannya atas sentralitas kelas sebagai kategori, terlalu esensialis dalam komitmennya kepada sebab-akibat struktural sosial, dan terlalu teleologis dalam kepercayaannya atas alur historis skala besar dan jangka panjang. Pendekatan itu juga tampak mengabaikan, atau setidaknya meminggirkan, wacana, kebudayaan, atau pertanyaan lebih luas mengenai makna, yang merupakan fokus kunci bagi karya baru mengenai representasi. (Lockman, 2009: 211)

Situasi yang sama terulang lintas disiplin dan di semua ruang akademis dan karya intelektual.

Dengan latar belakang ini, artikel ini kami tujukan bagi pertanyaan-pertanyaan yang saling terkait berikut:

1. Di bawah persoalan-persoalan yang diajukan oleh protes-protes di seluruh dunia terhadap krisis ekonomi global, dan mempertimbangkan bahwa struktur kelas hari ini kurang dikotomis, tempat-tempat perjuangan baru telah muncul, dan suatu

pandangan teleologis atas sejarah tidak masuk akal, apakah mungkin mengkonseptualisasikan pembentukan suatu subjek politis emansipatoris? Apakah pertemuan antara Marxisme dan posmodernisme membantu kita untuk menjawab pertanyaan ini? Dalam upaya kita untuk berhadapan dengan pertanyaan ini, kami akan bertanya:

2. Bagaimana para teoretisi Marxis menanggapi tantangan pendekatan posmodernis?
3. Secara khusus, bagaimana mereka mendekati konsep mengenai suatu "subjek politis emansipatoris"?

## **Bagian I: Tanggapan-tanggapan Marxis atas posmodernisme**

Dalam bagian pertama artikel ini, kami menggambarkan sebuah tipologi berbagai tanggapan yang berbeda dari para pemikir Marxis atas teori posmodernis (dan kenyataan pos-Fordis). Pastinya, tiap tipe merupakan suatu "tipe ideal" dalam arti Weberian: ia memasukkan karakteristik-karakteristik dan unsur-unsur utama, tetapi ia tidak selalu bersesuaian dengan semua karakteristik yang mungkin dalam satu kasus tertentu, sehingga banyak pendirian teoretis aktual tidak secara rapi sesuai dengan tipologi yang diajukan. Namun, tipologi kami menyumbang sistematisasi bidang ini, dengan menekankan jenis-jenis utama dari pertemuan yang rumit antara Marxisme dan posmodernisme.

Dua upaya sebelumnya untuk mengelompokkan pertemuan-pertemuan ini telah ditawarkan oleh Pauline Rosenau (1992) dan Stuart Sim (2000). Rosenau mengelompokkan reaksi Marxis atas posmodernisme ke dalam tiga pendekatan: Marxis ortodoks, yang menolak posmodernisme; neo-Marxis, yang "mempertahankan identitas esensial dan afiliasi utama mereka dengan suatu bentuk Hegelian dari Marxisme, tetapi ... memandang posmodernisme sebagai inspirasi untuk menguatkan kembali, menghidupkan kembali, serta memperluas Marxisme" (Rosenau, 1992: 160-161) dan keengganan untuk melepaskan analisis kelas; dan pos-Marxis, yang "menyesuaikan perspektif Marxis mereka sehingga ia bersesuaian dengan kerangka referensi posmodern" (Rosenau, 1992: 160), sementara melepaskan asas-asas yang sentral bagi Marxisme, seperti analisis kelas dan peran khusus kelas pekerja. Sim merujuk dua kelompok: *pos-Marxisme* dan *pos-Marxisme*, sambil menyiratkan tanpa menyebutkan eksistensi kelompok ketiga, yang tetap setia kepada ajaran-ajaran utama Marxisme. Bagi Sim, *pos-Marxis* adalah para pemikir yang datang dari suatu pandangan Marxis yang dengan menyesal menolak "masa lalu Marxis mereka" (Sim, 2000:1), sementara *pos-Marxis* tidak menolak Marxisme tetapi berupaya untuk melampauinya, merumuskannya kembali dalam rangka mencakup posmodernisme.

Dua studi ini adalah yang paling membuahkan hasil. Namun, di samping kontribusi mereka untuk memperjelas pertemuan-pertemuan antara Marxisme dan posmodernisme, kita menemukan kedua pengelompokan ini bermasalah. Milik Rosenau, karena pemahamannya atas neo-Marxisme sebagai Marxisme Hegelian kurang mencakup keluasan neo-Marxisme, membuatnya melupakan fakta bahwa, sebagaimana yang akan kita tunjukkan di bawah ini, banyak neo-Marxis yang menolak posmodernisme. Milik Sim, karena penekanannya kepada bentuk-bentuk berbeda dari pos-Marxisme membuatnya melewatkan bentuk-bentuk yang lebih rumit yang di dalamnya para sarjana yang datang dari pendekatan Marxis berupaya menghadapi tantangan dari posmodernisme. Tipologi kami lebih luas sekaligus lebih bernuansa.

Tipologi kami dihasilkan dari memadukan jawaban-jawaban bagi dua pertanyaan besar. Yang pertama, apakah para pemikir yang didiskusikan *menolak* atau *menerima* teori posmodern. Yang kedua, apakah penolakan atau penerimaan ini *penuh* atau *sebagian*. Garis temu antara jawaban bagi kedua pertanyaan menghasilkan empat pendirian, yang diwakili Tabel 1. Para pemikir Marxis yang menolak atau menerima teori posmodern secara *penuh* membuat suatu pilihan ketat antara Marxisme dan posmodernisme, sehingga menciptakan posisi “murni”. Kami menyebut penolakan total sebagai *Marxisme anti-posmodern*, dan penerimaan total sebagai *pos-Marxisme*. Para pemikir Marxis yang menolak atau menerima teori posmodern sebagian (atau dalam taraf tertentu, tetapi tidak seluruhnya) menawarkan beberapa bentuk pendirian yang terpadu. Kami menyebut penolakan secara sebagian dengan *posmodernisme Marxis*, dan penerimaan secara sebagian dengan *posmodernisme Marxis sintetis* (Tabel 1).<sup>3</sup>

**Tabel 1. Hubungan pemikiran Marxis dengan teori posmodernis**

	Penolakan	Penerimaan
<i>Penuh</i>	Marxisme anti-posmodern	Pos-Marxisme
<i>Sebagian</i>	Postmodernisme Marxis	Posmodernisme Marxis sintetis

### ***Marxisme anti-posmodern***

Para pemikir Marxis yang sepenuhnya menolak teori posmodernis, seperti Samir Amin, Leo Panitch, Eric Olin Wright, atau Ellen Wood, merupakan perwakilan dari Marxisme anti-posmodern. Perlawanan Marxis mereka terhadap posmodernisme esensial dan menyeluruh. Pada tingkat filosofis, mereka menolak posmodernisme karena ia menggunakan suatu perspektif idealis untuk menggantikan dasar-dasar materialis Marxis. Mereka menyatakan bahwa para posmodernis berurusan dengan kata-kata, representasi-representasi, wacana, dan seni, dan mengaburkan tingkat kenyataan simbolis sekunder ini dengan kenyataan sosio-ekonomi yang utama. Posmodernisme bersalah karena memutarbalikkan pemahaman yang paling mendasar atas hukum sebab-akibat dalam Marxisme—ditetapkannya superstruktur oleh infrastruktur material. Dengan kata lain, ia dianggap tidak melihat kondisi-kondisi objektif dan terlalu menekankan reaksi-reaksi subjektif atas kondisi-kondisi seperti itu, seolah-olah yang terakhir dapat dipisahkan dari yang awal.

Jenis pemikir Marxis ini tepatnya menghargai asumsi-asumsi “modern” yang ditolak para pemikir posmodernis, yaitu dikotomi dan hierarki antara material/ideal dan objektif/subjektif. Terlebih lagi, mereka mencurigai sumber-sumber dan motivasi-motivasi pemikiran posmodernis. Perbincangan posmodernis mengenai pos-kapitalisme dan masyarakat pos-kelas dilihat sebagai ungkapan dari cuilan “yuppie” kaum borjuis, yang nyatanya berurusan dengan manipulasi tanda-tanda—entah finansial atau artistik—dan mengaburkan posisi kelas-menengahnya dengan kenyataan sosial secara luas.

### ***Posmodernisme Marxis***

Para pemikir Marxis dalam kuadran ini menolak teori posmodernis secara sebagian. Contoh yang dapat diamati dari posisi ini adalah Frederic Jameson dan David Harvey. Menolak “sebagian” berarti bahwa mereka menolak pandangan posmodernis tentang posmodernisme sebagai suatu epistemologi atau filsafat baru, namun menerimanya sebagai suatu gambaran dari fitur-fitur utama kebudayaan dan kesadaran dari kapitalisme

kontemporer. Dengan kata lain, mereka melihat beberapa fitur sosial kontemporer bersifat posmodern, tetapi tidak melihat posmodernisme sebagai suatu teori penjelas bagi fitur-fitur ini. Posmodernisme tidak mengakui objektivitas, tetapi para pemikir Marxis dari jenis ini menganggap posmodernisme sendiri sebagai suatu ekspresi objektif dari kapitalisme hari ini. Dengan cara ini, bukan hanya mereka tidak menyangkal determinisme basis-suprastruktur dengan menyetujui eksistensi posmodernisme, tetapi melihat posmodernisme menegaskan kembali dan memberikan relevansi yang baru bagi analisis Marxis atas kapitalisme.

Kita dapat menebak watak pendekatan ini bahkan dari judul bukunya, yang sekarang terdengar akrab dan terkenal. Bagi Jameson, posmodernisme adalah “logika budaya dari kapitalisme akhir”, dan bagi David Harvey, kapitalisme akhir adalah “kondisi” posmodernitas. Keduanya menggabungkan posmodernitas ke dalam logika materialis Marxis. Fase-fase dan tipe-tipe yang berbeda dari kapitalisme menghasilkan bentuk-bentuk kultural yang berbeda. Suatu sistem ekonomi yang terpadu dapat melahirkan ekspresi-ekspresi kultural yang selalu berubah. Ekonomi kapitalisme akhir menghasilkan keragaman multikultural posmodern. Akhirnya, karena hal ini, Marxisme menjelaskan dan mencakup posmodernisme.

### *Posmodernisme Marxis sintetis*

Jenis ketiga dari tanggapan Marxis terhadap posmodernitas yang dicirikan di sini adalah para Marxis yang menerima dan memilih “sebagian” teori posmodern untuk menghasilkan apa yang kami sebut *posmodernisme Marxis sintetis*. Contoh utamanya adalah Nancy Fraser.

Para penulis ini mengambil “perspektif ganda” yang mengakui bekerjanya sekaligus dua rantai hirarki yang secara heuristik terpisah, yaitu hierarki kelas-kelas dan hierarki identitas-identitas. Yang pertama menciptakan eksploitasi material dan ketimpangan; yang kedua, peremehan atau pengacuhan simbolis. Poin utamanya adalah bahwa ketimpangan material dan kultural tidak bisa direduksi satu sama lain, bahkan dalam situasi kehidupan nyata keduanya selalu berkelindan.

### *Pos-Marxisme*

Akhirnya, kebalikan dari Marxisme anti-posmodern adalah *pos-Marxisme*, yang diwakili oleh para pemikir Marxis yang menerima asumsi-asumsi utama teori posmodernis. Di antara nama-nama yang dikenal luas di sini adalah Baudrillard awal, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, atau Jacques Rancière. Terlepas dari perbedaan teoretis yang mendalam di antara mereka, mereka memiliki kesamaan dalam kritik mereka atas teori Marxis sebagai sesuatu yang secara sosiologis anakronistik (salah waktu) dan secara filosofis dogmatik. Mereka menyerukan suatu revisi komprehensif dan mendalam atas Marxisme, yang faktanya melampauinya secara keseluruhan. Dari perspektif ini, pandangan Marxisme atas sejarah dan masyarakat terlalu fungsionalis dan teleologis, dalam semangat teori naturalis-evolutionis dan teori liberal-progresif. Tiada tempat yang tersisa di dalamnya bagi kontingensi historis dan agensi masyarakat, serta, Marxisme dan liberalisme dipandang sebagai saudara kembar modernis.

## **Bagian II: Perspektif Marxis mengenai subjek emansipatoris**

Dalam Marxisme klasik, subjek emansipatoris adalah proletariat, sekalipun analisis konkret atas perjuangan spesifik memerlukan konsep-konsep dan perspektif-perspektif tambahan yang menengahi antara “kelas” (sebagai suatu lokus dalam proses produksi) dan

subjek-subjek kolektif nyata dari perjuangan-perjuangan itu (seperti perkembangan gagasan Marx mengenai fraksi kelas dalam *18<sup>th</sup> Brumaire*, pemahaman Lenin atas partai sebagai *avant-garde* dari proletariat, atau konsep “blok historis” Gramsci). Namun, ciri-ciri masyarakat pos-Fordis/neoliberal yang terglobalisasi dan peminggiran (*decentering*) teoretis subjek modern oleh kritik para pos-strukturalis memaksa kita untuk memikirkan kembali “subjek emansipatoris”. Sementara dalam semua protes melawan krisis ekonomi kita dapat melihat dengan jelas pentingnya faktor-faktor kelas, protes-protes tersebut bukanlah suatu ekspresi dari kelas pekerja yang menjadi subjek. Hari ini, sulit untuk mempertahankan gagasan bahwa kelas pekerja (atau kelas lain apapun, sejauh diperhatikan) dalam makna Marxis klasik, yaitu sebagai yang diartikan dari posisinya dalam sistem produksi, sebagai subjek politis satu-satunya atau utama. Sulit menyatakan bahwa posisi kelas mendorong kepentingan-kepentingan objektif, dan bahwa posisi ini pada akhirnya akan mengarah kepada kesadaran kelas tertentu yang relevan. Perkara pelik ini bukanlah suatu yang baru, tetapi apa yang ingin kami tunjukkan di sini adalah bagaimana ia dihadapi oleh empat jenis tanggapan para Marxis atas tantangan posmodernis.

*Marxisme anti-posmodern* telah membuat adaptasi yang relatif kecil atas analisis mengenai masyarakat kapitalis berdasarkan eksploitasi kelas atau perdebatan bahwa kelas membentuk konsep penjelasan yang sentral dalam masyarakat ini. Analisis Wright mengenai kelas mencontohkan pendekatan ini.

*Posmodernis Marxis*, pada gilirannya, mempertahankan kategori-kategori utama Marxis dan pendekatan Marxis terkait hubungan antara proses-proses akumulasi dan kemunculan subjektivitas-subjektivitas kolektif. Mereka mengkonseptualisasi perjuangan-perjuangan baru dan subjektivitas-subjektivitas politik baru dari pendirian ini. Konsep David Harvey mengenai akumulasi melalui perampasan (*accumulation by dispossession*) menggambarkan perspektif ini.

*Posmodernis Marxis sintesis* memandang subjektivitas politis sebagai suatu perpaduan kategori-kategori sosio-ekonomi Marxis klasik, identitas, serta kategori-kategori kultural. Contoh utamanya adalah “dualisme perspektif” Nancy Fraser.

Akhirnya, sementara *pos-Marxis* memulai dengan kritik asumsi-asumsi Marxis, mereka pada akhirnya mendekonstruksi sepenuhnya konsep kelas dan mengajukan subjektivitas-subjektivitas kolektif baru, seperti gagasan Laclau mengenai “rakyat”, karena di antara para pos-Marxis dia telah mencurahkan upaya terbesar dalam mendiskusikan topik subjek politis.

Mari kita mendiskusikan empat posisi ini lebih rinci

Marxisme anti-posmodern dicontohkan oleh karya Eric Wright. Wright tetap yakin pada apa yang ia anggap sebagai dua ajaran utama teori Marxis, yaitu gagasan bahwa konsep kelas yang terpusat pada suatu eksploitasi penting untuk menjelaskan yang-sosial, dan suatu komitmen egalitarianisme radikal (Wright, 2005). Yang pertama menyiratkan bahwa kelompok-kelompok sosial yang terbentuk dalam ranah produksi menyediakan kerangka utama bagi pembentukan subjek-subjek kolektif. Wright secara eksplisit menolak apa yang ia sebut penggambaran masyarakat sebagai “penindasan-penindasan jamak” (*multiple oppressions*) (Wright, 1985). Yang kedua berarti bahwa analisis atas masyarakat kapitalis dan subjek-subjeknya harus dituntun oleh suatu pendekatan kritis dan emansipatoris.

Wright memahami kelas-kelas secara ortodoks sebagai suatu bentuk relasi produksi—sebagai suatu posisi spesifik dalam proses produksi kapitalis. Relasi kelas eksis “ketika hak-hak

dan kekuatan-kekuatan dari rakyat atas aset-aset produktif tidak didistribusikan dengan setara – ketika beberapa orang memiliki hak-hak/kekuatan-kekuatan lebih besar berkaitan dengan jenis-jenis spesifik aset-aset produktif daripada lainnya” (Wright, 2005: 10). Dia juga mempertahankan pernyataan Marxis klasik bahwa dalam kapitalisme, relasi kelas utama adalah relasi modal/tenaga kerja (*capital/labor*). Pada waktu yang sama, dia menyadari fakta bahwa para pengkaji masyarakat kontemporer harus menanggapi kerumitan-kerumitan dan percabangan-percabangan struktur sosial menurut cara yang dengannya “hak-hak dan kekuatan-kekuatan dipecah, didistribusikan dan digabungkan kembali” (Wright, 2005: 13). Karenanya, dia memperkenalkan kerumitan dalam model biner untuk mencerminkan relasi-relasi konkret dari produksi dalam dunia pos-Fordis secara lebih tepat, dan untuk menerangkan dengan lebih baik pembentukan subjek-subjek sosiopolitis melampaui penjelasan standar. Gagasan terkenalnya mengenai lokasi-lokasi yang kontradiktif di dalam suatu modus produksi dan di antara modus-modus produksi (Wright, 1985) membantu menggambarkan kerumitan yang lahir dari fakta-fakta berikut: bahwa orang-orang menempati lokasi-lokasi kelas jamak sekaligus, bahwa ada dimensi temporal bagi lokasi (*karir vs jabatan*) (*career vs slots*), bahwa lokasi-lokasi itu bertingkat (*kapitalis kecil dan besar, pekerja terampil dan tak terampil*), dan bahwa struktur keluarga berinteraksi dengan relasi-relasi kelas.

Ciri utama posmodernisme Marxis adalah penerimaan atas teori posmodern sebagai suatu gambaran parsial tentang masyarakat kontemporer, yang mempertahankan penjelasan Marxis tentang perkembangan-perkembangan ini. Posisi ini dicontohkan oleh karya David Harvey (1982, 2003, 2005 dan juga Aronowitz, 2004). Dia menyatakan bahwa kerumitan subjektivitas politik dalam masyarakat kontemporer dihasilkan dari perubahan-perubahan dalam pola-pola akumulasi dan, khususnya, dalam kesalingkaitan antara ruang teritorial dan akumulasi kapitalis. Karena pola-pola dari akumulasi dan apropriasi sumber daya merupakan proses-proses sosial utama, kelas memainkan peran kunci sebagai kategori penjelas dan sebagai suatu subjek kolektif.

Kebaruan posisi Harvey terletak dalam argumen bahwa persaingan spasial, atau ciri-ciri dari akumulasi melalui perampasan, dapat menjelaskan kemunculan dari suatu cakupan subjektivitas-subjektivitas kolektif yang lebih kompleks. Akibatnya, persaingan spasial di antara “lokalitas-lokalitas, kota-kota, wilayah-wilayah dan bangsa-bangsa” mendukung perkembangan solidaritas komunal dan nasional “sebagai cara mempertahankan berbagai kepentingan kelompok dan kelas” (Harvey, 1982: 221). Harvey, karenanya, mengakui arti penting identitas-identitas kolektif non-kelas, walaupun, sebagaimana dapat kita sadari dari kutipan ini, identitas-identitas ini disematkan kepada kepentingan-kepentingan kelas. Dalam pandangan Harvey, contohnya, banyak kelompok kelas menengah berlindung di balik teritori, bangsa, dan tradisi sebagai cara untuk bergerak melawan kapitalisme neoliberal yang memangsa. Rasisme dan nasionalisme, yang pernah menyatukan negara-bangsa dan kerajaan, muncul kembali di antara borjuis kecil dan kelas pekerja sebagai suatu senjata untuk menata diri melawan kosmopolitanisme dari modal finansial. Gagasan-gagasan mengenai solidaritas komunitas atau nasional lahir dari “kondisi material objektif” dan “perjuangan kelas global ... terpecah-pecah menjadi berbagai konflik berbasis wilayah yang mendukung, mempertahankan, dan dalam beberapa kasus bahkan membentuk kembali semua sikap praduga lokal dan tradisi-tradisi yang mengeras” (Harvey, 1982: 420). Nasionalisme dan penguatan identitas-identitas etnis, karenanya, adalah suatu reaksi atas kapitalisme global.



Dipetakan lebih luas, prinsip-prinsip posmodernis kapitalisme global dapat dijelaskan berdasarkan teori Harvey mengenai *akumulasi berdasarkan perampasan (accumulation by dispossession)*. Akumulasi kapitalis hari ini terjadi tidak hanya melalui reproduksi yang diperluas, tetapi juga melalui perampasan kelompok-kelompok sosial dari aset-aset atau hak-hak mereka. Contohnya, pengusiran para petani dari lahan-lahan mereka supaya dapat diprivatisasi; pengambilalihan hal-hal yang menjadi milik bersama (hari ini mengambil bentuk privatisasi sumber daya-sumber daya publik dan *welfare state*); penindasan atas bentuk-bentuk produksi alternatif (non-kapitalis atau non-komodifikasi); proses-proses kolonial atau imperial pengambilalihan aset; perbudakan-perbudakan baru (anak-anak dan seksual); finansialisasi; dan hak-hak cipta atau pematenan material genetik.

Akumulasi melalui perampasan bergumul dengan komunitas-komunitas lokal atau etnik subordinat, struktur kekeluargaan, serta penataan keluarga dan rumah tangga (Harvey, 2003). Perbedaan mode interaksi (penindasan, kooptasi, atau perlawanan) meletakkan dasar bagi jenis-jenis subjektivitas kolektif yang berbeda dan satu variasi besar dari perjuangan-perjuangan. Banyak dari gerakan oposisi ini “sangat berbeda dari ... gerakan berbasis-pekerja”. Mereka menghindari “bentuk-bentuk tradisional dari organisasi perburuhan” dan kerap kali membangun “bentuk-bentuk otonom dari organisasi sosial” – suatu variasi “gerakan-gerakan sosial yang lokal, terpecah, dan sangat terdiferensiasi” (Harvey, 2003: 189). Pandangan ini bahkan memperhitungkan kemungkinan bagi subjek-subjek sosial untuk muncul sebagai hasil dari perjuangan-perjuangan politis yang tertutup, seperti oposisi atas pengekangan kebebasan-kebebasan sipil (Harvey, 2003).

Kesimpulannya, Harvey mengakui adanya subjek-subjek politis kolektif non-kelas, begitu juga fakta bahwa tidak ada “konsepsi sederhana mengenai kelas yang dapat kita anggap sebagai agen utama (apalagi eksklusif) dari perubahan sejarah” (Harvey, 2005: 202). Gagasannya mengenai dua cara akumulasi kapital menjelaskan kemunculan gerakan-gerakan yang menantang eksploitasi berdasarkan reproduksi yang diperluas (kerja upahan dan kondisi-kondisi yang menentukan upah sosial), bersama-sama pihak lainnya yang menentang akumulasi berdasarkan perampasan (oposisi atas pemindahan populasi para petani dari lahan mereka, atas privatisasi *welfare state* dan atas praktik-praktik modal finansial). Kerangka analitis ini memberikan suatu penjelasan yang lebih rumit mengenai kemunculan subjek-subjek politis daripada oposisi Marxis klasik antara borjuis dan proletariat (bahkan dalam analisis yang lebih berbobot dan rumit yang diberikan oleh Wright).

Dengan menteorikan asal-usul non-kelas otonom dari subjek-subjek politis, pendekatan *posmodernis Marxis sintetis* pada gilirannya membawa kita selangkah lebih jauh daripada Marxisme tradisional. Sementara Wright dan Harvey menganggap kelas sebagai subjek sosial kolektif utama dan perjuangan kelas sebagai bentuk kunci dari konflik sosial, Nancy Fraser mengambil apa yang ia sebut “dualisme perspektif”, di mana subjektivitas kelas dan identitas memainkan peran paralel dan terpadu.

Dalam pandangan Fraser, konflik-konflik sosial tidaklah terorganisir seputar satu isu tunggal—perjuangan kelas atau perjuangan kultural/status—tetapi di seputar dua tema sentral yang berbeda dan berkelindan: redistribusi sumber daya-sumber daya material dan pemahaman atas nilai dari identitas atau budaya seseorang. Dia menganggap bahwa “keruntuhan komunisme, kebangkitan ideologi pasar-bebas, bangkitnya ‘politik identitas’ dalam ... bentuk-bentuk fundamental dan progresifnya ... telah bersekongkol untuk

meminggirkan ... seruan untuk redistribusi yang setara” (Fraser, 2003: 8, dalam Fraser dan Honneth, 2003). Menurut “dualisme perspektif” Fraser, politik kelas dan politik identitas tidaklah terpisah, tetapi justru merupakan modus-modus yang saling berkaitan dari pembentukan subjek kolektif (dalam Fraser dan Honneth, 2003).

Dualisme Fraser lebih dekat dengan perspektif dekonstruktif dari pendekatan-pendekatan posmodernis. Ia tidak menganggap kelas dan identitas sebagai bangunan homogen, tetapi sebagai subjektivitas-subjektivitas yang selalu dimasuki, baik oleh seruan-seruan redistribusi dan seruan-seruan untuk diakui. Lebih-lebih, konflik-konflik tidak lahir hanya dari eksploitasi (isu redistribusi) atau pengabaian (isu pengakuan), tetapi juga dari proses-proses yang melibatkan ketidakadilan dalam kerangka redistribusi dan pengakuan (rekognisi). Karenanya, sementara kelas merupakan contoh paradigmatik bagi permasalahan redistribusi, ia bukanlah satu-satunya. “Yang juga termasuk adalah kelompok-kelompok rasial dari imigran-imigran atau minoritas etnis yang dapat ditentukan secara ekonomis . . . para wanita termasuk di sini pula – sebagai jenis kelamin yang terbebani kerja pengasuhan terbesar yang tak digaji” (Fraser, 2003: 14, dalam Fraser dan Honneth, 2003).<sup>4</sup>

Sintesis Marxisme dan posmodernisme yang diambil oleh Fraser memandang kelas dan pilihan seksual sebagai tipe-tipe ideal redistribusi dan pengakuan secara berurutan, dan menganggap bahwa dalam kehidupan nyata, kategori-kategori memang “berdimensi-ganda”. Gender dan ras secara jelas adalah persimpangan antara perspektif redistribusi dan pengakuan, karena kaum wanita dan kelompok-kelompok etnis pinggiran “menderita karena maldistribusi dan misrekognisi”. Bahkan kelas pun harus dianggap sebagai berdimensi-ganda, karena perusakan-perusakan status (*status harms*) yang lahir sebagai suatu efek samping dari struktur ekonomi “mungkin sejak saat itu telah memiliki suatu kehidupan sendiri” (Fraser, 2003: 57, dalam Fraser dan Honneth, 2003).

Kesimpulannya, untuk menteorisasi hubungan di antara struktur kelas dan tatanan status dalam kapitalisme global modern akhir, kita harus melihat kelas dan status sebagai kategori-kategori yang sama-sama tak bisa direduksi dan juga saling berkelindan secara kuat. Fraser bahkan hampir mendalilkan suatu subjek yang terbentuk dari pluralitas posisi-posisi subjek (suatu gagasan, yang akan segera kita ketahui, sebagai sesuatu yang sentral bagi pos-Marxisme) ketika dia berpendapat bahwa “individu-individu adalah titik-titik pertemuan bagi poros-poros subordinasi yang jamak dan saling memotong” (Fraser, 2003: 57, dalam Fraser dan Honneth, 2003). Untuk meletakkan dalam kerangka diskusi kita kali ini, posmodernisme Marxis sintesis Fraser memiliki dua kelebihan atas posisi-posisi sebelumnya. Pertama, ia mengenalkan suatu sumber perjuangan politik emansipatoris yang non-ekonomis dan berkaitan dengan status, yaitu misrekognisi. Kedua, ia menunjukkan keteririsan dari sumber semacam ini dengan asal-usul ekonomi dan terkait-kelas dari perjuangan politik emansipatoris, yaitu ketidaksetaraan (*inequality*).

Akhirnya, kita lihat pos-Marxisme. Kritiknya atas teori Marxis mengarah kepada penolakan teori ini dan penggantinya dengan satu atau lain versi dari “identitas diskursif” sebagai dasar bagi subjek politis baru. Dalam pandangan ini, subjek-subjek, atau agen-agen sosial yang lebih sesuai, tidaklah mendasarkan diri kepada suatu struktur sosial “objektif”, dan batasan-batasan mereka justru lebih kabur atau cair. Pada ujung spektrum pos-Marxis ini, kita menemukan para pemikir yang begitu beragam, seperti Holloway, Rancière, atau Hindess dan Hirst. Tetapi, posisi ini utamanya dikaitkan dengan Laclau dan Mouffe, pemikir pertama yang

dirujuk sebagai pos-Marxis, dan banyak menyumbangkan pemikiran mereka bagi persoalan subjek politis. Konseptualisasi Laclau mengenai rakyat (*people*) sebagai subjek perjuangan hegemonik dalam masyarakat kontemporer tampak sebagai gagasan paling berkembang mengenai suatu agen kolektif politis dalam aliran-aliran pos-Marxis.<sup>5</sup>

Laclau dan Mouffe (1985) menolak gagasan mengenai kelas sebagai suatu “subjek *a priori*”. Penolakan ini memiliki dua wajah. Pertama, mereka menolak pernyataan bahwa setiap subjek politis itu niscaya (atau sebenarnya) merupakan suatu subjek kelas. Kedua, mereka menolak gagasan bahwa ada suatu domain sosial (lapangan produksi) di mana kelas-kelas telah ada sebelumnya (dalam dirinya, secara objektif, dan seterusnya). Bagi para pemikir ini, subjek sosial apapun (dalam kelas-kelas, jenis kelamin atau kelompok-kelompok etnis) hanya ada sebagai akibat dari aksi politis (yang selalu sudah ada). Baik individu maupun kelompok tidak mendefinisikan diri mereka sendiri sebagai subjek-subjek yang didasarkan pada penentuan pra-politis. Kita terbuat dari suatu kejamakan “posisi-posisi subjek” yang secara hierarkis terorganisir sebagai hasil dari suatu perjuangan politis yang hegemonik. Sebenarnya, hegemoni merupakan stabilisasi yang parsial (selalu terancam) dari posisi-posisi subjek yang berbeda dengan cara mengistimewakan atau menekankan beberapa di antaranya. Ada antagonisme-antagonisme tertentu (satu atau beberapa) yang di sekelilingnya subjek-subjek kolektif terbentuk.

Dalam buku barunya mengenai populisme, Laclau (2005) menjelajahi lebih jauh konseptualisasi mengenai subjek politis kolektif ini. Laclau menganggap “rakyat” sebagai subjek politis kontemporer yang relevan, atau bentuk utama subjektivitas politis dalam masyarakat-masyarakat kontemporer. Faktanya, bagi Laclau, gagasan “rakyat” hadir sebagai alternatif bagi konsep kelas sosial, sebagai cara memahami penciptaan identitas-identitas sosial (Laclau, 2006).

Laclau melihat “tuntutan sosial” sebagai titik awal dalam proses subjek-subjek politis terbentuk. Tuntutan-tuntutan sosial ialah pernyataan-pernyataan yang hadir di setiap masyarakat sebagai hasil interaksi sosial. Tuntutan-tuntutan yang tetap berbeda satu sama lain adalah tuntutan demokratis, dan pendekatan yang menysasar dan menemui tuntutan-tuntutan yang terpisah ini disebut “diferensial”. Ketika tuntutan-tuntutan tidak terpenuhi, suatu rantai kesamaan dapat terbangun di sekitar mereka sedemikian rupa, sehingga sebuah batas internal terbentuk dalam komunitas politik, suatu batas yang memisahkan rakyat dari kekuasaan. Tuntutan-tuntutan ini, yang Laclau sebut “populer”, melahirkan “suatu subjektivitas sosial yang lebih luas” melalui artikulasi mereka yang ekuivalen (Laclau, 2005: 74). Namun harus dicatat, tidak ada yang “objektif” mengenai tuntutan-tuntutan ini yang memudahkan hubungan mereka dengan suatu rantai kesamaan. Mereka hanya dihubungkan oleh oposisi mereka terhadap kekuasaan. Kurangnya sebuah rantai penghubung yang “positif” dan “objektif” di luar perjuangan politis berarti bahwa tuntutan-tuntutan populer hanya bisa dihubungkan secara simbolik oleh suatu perjuangan politik yang, sebagaimana disebutkan di atas, membangun rantai kesamaan (Laclau, 2006).

Rakyat terbentuk sebagai suatu subjek politis kolektif ketika “suatu batas eksklusi membagi rakyat menjadi dua kubu”. Ia muncul ketika artikulasi dari beberapa tuntutan yang berbeda hadir sedemikian rupa, sehingga salah satu atau dua dari mereka, dengan terhubung kepada suatu posisi subjek tertentu, melambangkan keseluruhan. Rakyat sebagai suatu subjek kolektif muncul sebagai hasil dari suatu perjuangan hegemonik yang di dalamnya subjek baru

menyatakan diri agar dipandang sebagai “satu-satunya totalitas yang sah” (Laclau, 2005: 81). Karena penanda-penanda pada hakikatnya kosong, universalitas dapat mengungkapkan dirinya hanya dalam suatu partikularitas tertentu. Hegemoni adalah proses yang darinya suatu partikularitas tertentu memberi nama kepada universalitas.

### **Bagian III: Masih dapatkah kita berpikir mengenai suatu subjek emansipatoris?**

Empat pendekatan teoretis yang ditinjau di atas memiliki cara-cara yang berbeda dalam menghadapi tantangan yang diajukan terhadap konsepsi Marxis mengenai subjek emansipatoris, dengan memadukan proses sosiologis dan perkembangan teoretis yang terkait posmodernitas. Bagaimanapun, sementara mereka menjawab tantangan-tantangan ini, tidak ada satu pun yang dapat mengatasi kontradiksi-kontradiksi dan keterbatasan internalnya.

Marxisme anti-posmodern Wright tidak memperbaiki analisis kelas dengan mempertimbangkan kerumitan stratifikasi sosial masyarakat pos-Fordis. Tetapi, ia gagal menangkap keteririsan kelas dengan kategori-kategori non-ekonomis lain yang di sekelilingnya masyarakat terstruktur. Wright menanggapi mediasi-mediasi di antara posisi-posisi kelas serta kesadaran-kesadaran dan praktik-praktik kelas secara terpisah dari aspek-aspek lain struktur sosial. Selebihnya, dia tidak menjelaskan secara spesifik apakah kelas merupakan faktor yang menentukan atau hanya satu di antara hal-hal lain yang menentukan; dan jika benar yang terakhir, bagaimana kelas berhubungan dengan hal-hal penentu lain dari subjek-subjek politis kolektif. Akibatnya, kami yakin bahwa, terlepas dari perbaikannya yang mendasar atas analisis kelas ortodoks, posisi Wright tidak benar-benar menjawab tantangan kondisi-kondisi pos-Fordis dan teori posmodernis. Karenanya, dia tidak menawarkan suatu teorisasi yang memadai tentang subjek emansipatoris. Tampaknya bagi Marxisme anti-posmodern, masih ada suatu dasar yang menentukan dan faktor-faktor tambahan yang belum diteorisasi.

Posmodernisme Marxis dari David Harvey, pada gilirannya, menganggap perjuangan kelas sebagai niscaya dan tidak bisa dicegah, baik secara epistemologis (sebagai suatu mekanisme penjelas) dan secara normatif (sebagai asal-usul subjek emansipatoris). Bagaimanapun, sementara kerangka analitis penulis ini cukup menjelaskan ketika berurusan dengan dimensi sosio-ekonomi “struktural”, ia hanya menjadi derivatif ketika berurusan dengan dimensi-dimensi kultural dan politis. Ia mengakui kehadiran politis dari subjek-subjek kolektif “kultural” atau “terpusat pada identitas” (*identity-centered*), tetapi tak bisa menganalisisnya dalam istilah-istilah yang relatif otonom. Karenanya ia berpendapat bahwa masyarakat penuh dengan kerumitan “yang lahir dari ras, gender, dan perbedaan-perbedaan etnis yang secara ketat berkelindan dengan identitas-identitas kelas”, tetapi tidak memperhitungkan kelindan ini. Kelemahan ini jelas, contohnya, dalam penanganannya atas identitas-identitas, yang hanya merupakan turunan dan mengacu kembali kepada kepentingan-kepentingan material. Harvey kesulitan menjelaskan perjuangan feminis, atau keberlanjutan dari perjuangan-perjuangan etnis atau nasionalis dalam kasus di mana perampasan itu tak relevan. Subjek-subjek emansipatoris “yang bukan merupakan kelas-kelas” diakui secara empiris, namun tidak secara teoretis, setidaknya bukan sebagai hal yang independen.

Dalam sintesis antara Marxisme dan posmodernisme yang ditawarkan oleh Nancy Fraser, istilah “kelas dan status” digunakan untuk menunjukkan “tatanan-tatanan subordinasi yang tertanam secara sosial”. Perlu dicatat, Fraser menyatakan saling-terhubungnya kelas dan status hampir selalu sebagai sumber ketidakadilan, dan sangat sedikit memberikan perhatian untuk mengkonseptualisasikan cara-cara subjek-subjek kolektif terbentuk melawan ketidakadilan itu. Karenanya, walaupun penulis ini memang membahas fondasi-fondasi masyarakat ketika mendiskusikan kelas dan status, dia menganalisis agensi politis dari perspektif demokrasi deliberatif, di mana partai-partai (dituntun oleh filsafat-filsafat politik) mengajukan tuntutan keadilan. Politik kemudian direduksi kepada tuntutan-tuntutan yang terus berkembang dalam mengoreksi ketidakadilan-ketidakadilan atau, seperti ditekankan Fraser dalam makalah terbarunya, politik direduksi kepada tahap di mana “perjuangan-perjuangan atas distribusi dan rekognisi dimainkan” (Fraser, 2008: 278). Keacuhannya terhadap politik sebagai permainan konfliktual antara kekuasaan dan kepentingan-kepentingan menyulitkan kita untuk merenungkan syarat-syarat bagi kemunculan subjek-subjek politis emansipatoris. Selain itu, emansipasi yang dibatasi menjadi “kesetaraan partisipasi” (*parity of participation*) berarti menggantikan tujuan dari egalitarianisme radikal dengan sesuatu yang jauh tidak ambisius, yaitu demokrasi deliberatif. Wawasan ini, pada gilirannya, diperkuat oleh pemahaman Fraser atas yang politis sebagai “dimensi dari politik yang terutama berurusan dengan representasi” (Fraser, 2008: 278).

Terakhir, pendekatan pos-Marxis Laclau (sebagaimana para sarjana lainnya, misalkan Gibson-Graham, Wolff, dan Resnick) memisahkan diri sepenuhnya dari analisis Marxis. Beberapa kritikus Laclau bahkan menyatakan bahwa dia telah mengulang kembali tema-tema liberal-demokratis dalam satu bahasa pos-strukturalis. Permasalahan utama konseptualisasi Laclau mengenai pembentukan subjek politis adalah bahwa ia terlalu hiperpolitik. Dalam arti ini, pendekatan penulis ini ironisnya dapat disebut pra-Marxis daripada pos-Marxis; ia menyajikan suatu gagasan voluntaristik dan kultural mengenai subjek-subjek politis. Kita dapat mengatakan dengan cara terbaik, bahwa “kekuasaan”, dan sanggahan kepadanya, ialah basis objektif politik, tetapi hal ini malah merupakan penjelasan yang melingkar—politik menjelaskan politik.

Dalam pandangan Laclau, setiap perpaduan pernyataan-pernyataan politik itu mungkin. Rakyat sebagai subjek kolektif semata-mata adalah hasil perjuangan-perjuangan politik yang membangun rantai-rantai kesamaan, sambil menetapkan satu tuntutan khusus sebagai yang mewakili universalitas yang tak dapat muncul begitu saja (karena itu, muncul watak hegemonik dari perjuangan). Di samping a-materialistik (atau anti-ekonomis), kerangka teoretis Laclau sama sekali tidak memperhitungkan keterbatasan-keterbatasan pada pembentukan subjek-subjek politis yang dibawa oleh “pengendapan” historis praktik-praktik dan cara-cara tertentu untuk memahami yang sosial (agama, nasionalisme). Dalam buku *Hegemoni*, Laclau-Mouffe memang melihat bahwa, sementara penanda-penanda mengambang, ada titik-titik tertentu di sana (*points de capiton* Lacan) yang mewakili tanda-tanda yang lebih stabil (perpaduan yang lebih mungkin dari penanda dan tinanda). Namun, mereka tidak mengembangkan konsep-konsep teoretis yang membuat kita mampu menjelaskan dengan cara seperti apa praktik-praktik lampau diterjemahkan menjadi—atau berkontribusi untuk menjelaskan—ciri-ciri spesifik *points de capiton* tersebut. Dalam artikel seminalnya “*Mengapa penanda-penanda kosong berarti bagi politik?*”, Laclau eksplisit menyatakan bahwa tak ada sesuatu di masa lampau yang dapat membuat suatu tinanda atau pernyataan tertentu menjadi lebih

mungkin sebagai sesuatu yang mewujudkan negasi. Laclau bertanya, “Apa ... yang menentukan satu penanda, dibanding lainnya, memiliki fungsi penandaan tersebut, di dalam keadaan-keadaan berbeda?” (Laclau, 1996: 40). Jawabannya, itulah perjuangan hegemonik, tetapi ini adalah perjuangan di mana, “antara ... negasi dan tubuh yang melalui negasi itu mengungkapkan dirinya, tidak ada hubungan niscaya—tidak ada yang menentukan sebelumnya bahwa satu tubuh tertentu seharusnya menjadi tubuh yang ditentukan untuk mewujudkan negasi apa adanya” (Laclau, 1996: 41). Dapat dinyatakan bahwa Laclau hanya menafikan kemungkinan penentuan *a priori*, karena dia secara khusus menyatakan, “tidak setiap posisi di masyarakat, tidak setiap perjuangan secara setara mampu mengubah isinya sendiri dalam suatu titik *nodal* yang menjadi suatu penanda kosong” (Laclau, 1996: 43). Tetapi, ini tetap sekadar statemen, karena tidak menyediakan perangkat teoretis yang akan membantu kita mengenali yang mana dari titik-titik *nodal* tersebut, dan bagaimana “keefektifan historis dari logika lokasi struktural yang diferensial terjadi” (Laclau, 1996: 43), dan pertanyaan-pertanyaan awalnya hanya dapat dijawab dengan contoh-contoh yang tepat.

Akibatnya, penjelasan Laclau atas penciptaan suatu subjek emansipatoris dalam istilah-istilah pos-strukturalis cacat. Dia tak dapat menjelaskan mengapa pernyataan-pernyataan tertentu dapat diletakkan sebagai suatu tuntutan khusus di dalam logika perbedaan, sementara yang lainnya tidak bisa diserap oleh sistem dan menyediakan dasar bagi pembangunan rantai-rantai kesamaan yang akhirnya mengarah kepada penciptaan rakyat sebagai suatu subjek kolektif.

Bahkan lebih mendasar, Laclau tak dapat memperhitungkan awal kemunculan tuntutan-tuntutan itu. Jika subjek-subjek politis telah selalu merupakan hasil suatu perjuangan politis, siapakah subjek-subjek yang meningkatkan tuntutan-tuntutan sosial dasar yang akan membentuk rantai hubungan kesamaan? Kita dihadapkan di sini pada suatu kemunduran tak berhingga menuju tuntutan-tuntutan sosial dasar yang bersifat satuan, atau pada keniscayaan untuk melihat bahwa ada sejenis hubungan “sosial” dan “pra-politis” di antara umat manusia yang dapat membenarkan kemunculan tuntutan-tuntutan sosial utama ini. Pada yang pertama, kita tidak benar-benar dapat menjelaskan kemunculan subjek-subjek kolektif. Pada yang kedua, kita kembali lagi kepada “esensialisme dari yang sosial” dari teori Marxis (seperti dicontohkan secara berbeda oleh Wright dan Harvey) atau kepada dualisme masyarakat (seperti digambarkan oleh Fraser), yang ditolak oleh Laclau dan Mouffe (Laclau, 2006: Laclau dan Mouffe, 1985). Dalam pandangan kami, pada akhirnya pelarian pos-Marxisme dari dasar Marxis menjadi terlalu jauh—entah menuju indeterminisme yang tak dapat dijelaskan, atau kembali ke determinisme sosial yang ingin mereka tolak.

Mengingat upaya kita menelusuri pertemuan Marxis/posmodernis ini, kita dapat kembali ke pertanyaan yang kita ajukan di awal: Apakah ada suatu konsep subjek emansipatoris yang relevan bagi kondisi-kondisi struktural dan orientasi teoretis masyarakat kontemporer? Kami pikir kami tidak mampu memberikan jawaban atas pertanyaan ini, hanya saja kami akan mengajukan beberapa arah untuk renungan lebih lanjut. Pertama, seperti telah kami nyatakan di awal, kami berpikir bahwa kemunculan gelombang gerakan-gerakan protes yang demokratis dan anti-neoliberal di seluruh dunia—dari dunia Arab, melalui Eropa, dan dari AS ke Amerika Latin—menegaskan keabsahan pertanyaan ini. Gelombang ini menekankan perlunya berpikir dalam kerangka aksi emansipatoris kolektif (memahami emansipasi bukan sebagai suatu tujuan yang sempurna dan final, tetapi sebagai perkembangan yang terus berlanjut dari apa yang oleh Étienne Balibar disebut *égaliberté*).

Kedua, kami pikir bahwa suatu upaya untuk menghadapi persoalan yang ditarik dari pandangan-pandangan kuat yang diberikan Marxisme, harus memasukkan sumbangan keempat kategori yang telah kami gambarkan dalam artikel ini. Gerakan-gerakan protes saat ini menggarisbawahi pentingnya analisis kelas. Analisis struktur kelas yang kompleks dari masyarakat kontemporer yang dikembangkan oleh Wright (dan para Marxis anti-posmodern) berharga untuk mengkonseptualisasikan dan menjelaskan kemunculan dan ciri-ciri gerakan-gerakan sosial kontemporer (konseptualisasinya atas “kelas-kelas menengah” sebagai pihak yang mengeksploitasi sekaligus yang tereksploitasi penting untuk memahami peran yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu dari “kelas menengah” ini di dalam protes). Pendekatan posmodernisme Marxis Harvey atas persaingan spasial dan akumulasi melalui perampasan, pada gilirannya, membuat kita memahami bukan hanya dimensi global dari protes-protes tersebut (contohnya, kerumitan apa yang dinamai “*Arab Spring*”), tetapi juga peran yang dimainkan ruang di dalamnya (contoh, okupasi ruang publik dan perjuangan melindungi diri dari pengusiran-pengusiran).

Protes-protes tersebut juga menunjukkan bahwa, seperti dinyatakan oleh Marxisme posmodern sintesis Fraser, ada bentuk-bentuk penindasan yang tak dapat direduksi menjadi eksploitasi berbasis kelas atau perampasan ekonomis. Sementara bentuk-bentuk berbeda dari penindasan ini berinteraksi dan meng-overdeterminasi satu sama lain, mereka tak dapat direduksi satu sama lain, seperti ditemukan dalam teori Marxis (bahkan dalam bentuk posmodernis Marxis-nya). Gerakan-gerakan protes tahun 2010 dan 2011 juga membuktikan bahwa para pos-Marxis seperti Laclau benar ketika berpendapat bahwa pembentukan subjek-subjek secara umum, dan secara khusus subjek-subjek emansipatoris yang mungkin, bukanlah “refleksi” dari suatu situasi sosial (misal, ekonomi, atau kelas), bukan pula merupakan hasil dari suatu generalisasi atau abstraksi. Sebaliknya, pembentukan seperti itu merupakan hasil artikulasi politis dari perjuangan-perjuangan yang berkaitan dengan kategori-kategori sosial berbeda yang di sekelilingnya distribusi kekuasaan dan sumber daya-sumber daya diorganisir. Seperti Laclau katakan, kemunculan suatu subjek politis kolektif diperlukan untuk membangun “rantai-rantai kesamaan” di antara tuntutan-tuntutan yang berbeda.

Pengamatan singkat atas gerakan-gerakan protes kontemporer di seluruh dunia menunjukkan bahwa gerakan-gerakan itu muncul sebagai artikulasi di antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda dan perjuangan-perjuangan mereka, sedemikian rupa sehingga ada suatu momen politis ketika “dualisme perspektif” Fraser mengalami penyatuan yang parsial dan selalu terancam (definisi Laclau dan Mouffe atas hegemoni). Ia juga memberitahu kita bahwa perjuangan-perjuangan sosial tidak dapat dipahami hanya dalam istilah “mengoreksi ketidakadilan”. Tetapi, hal-hal ini juga harus dianalisis dalam istilah konfrontasi antara model-model distribusi kekuasaan dan sumber daya-sumber daya yang saling bertentangan, model-model yang sesuai dengan kepentingan kelompok-kelompok sosial yang berbeda (Wright dan Harvey).

Bagaimanapun, gerakan-gerakan ini menunjukkan bahwa, meski kita menyetujui bahwa tidak ada kelompok-kelompok sosial pra-politis dan bahwa subjek-subjek sosial telah selalu politis, gerakan-gerakan ini tidaklah muncul secara *ex novo* dan dengan bebas serta secara sukarela membentuk dirinya dengan membangun rantai-rantai kesamaan di antara berbagai tuntutan-tuntutan khusus. Justru, mereka lahir dari artikulasi kelompok-kelompok sosial; artikulasi yang muncul, di satu sisi, dari cara spesifik dan historis di mana sumber daya-sumber daya dan kekuasaan secara tidak setara didistribusikan; dan di sisi lain, dari luapan

perjuangan-perjuangan politik sebelumnya. Dalam arti ini, dibangun atas teori ruang sosial Pierre Bourdieu, kita dapat berpendapat bahwa gerakan-gerakan protes saat ini menyatakan bahwa subjek politis sebagai suatu agen politis dibangun melalui praktik-praktik politis (pembangunan rantai-rantai kesamaan), tetapi pembangunan ini terikat dengan kedekatan atau jarak di antara kelompok-kelompok sosial berbeda di dalam ruang sosial. Kedekatan dan jarak, pada gilirannya diukur dalam hubungannya dengan dua asas diferensiasi, yaitu modal ekonomi dan budaya (yang berkorelasi dengan konsep-konsep redistribusi dan rekognisi Fraser). Akan tetapi, dan di sini kita memisahkan diri dari Bordieu pada tingkat tertentu, perbedaan bentuk-bentuk modal seperti itu bukanlah dimensi-dimensi yang tertutup. Tidak pula mereka pra-politis atau a-historis. Seperti dinyatakan oleh Fraser, mereka secara terus-menerus saling mempengaruhi satu sama lain dan telah selalu merupakan hasil dari tindakan manusia, suatu praksis yang selalu politis.

## Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima dana khusus dari agensi pendanaan di sektor publik, komersial, atau non-profit.

## Catatan

---

1. Walaupun Althusser mengajukan suatu Marxisme tanpa suatu Subjek dengan 'S' besar, Althusserianisme tidak menyangkal peran emansipatoris kelas pekerja dan sentralitas perjuangan kelas. Hubungan antara Marxisme Althusserian dan posmodernisme merupakan sesuatu yang rumit, dan menganalisisnya secara menyeluruh melampaui cakupan artikel ini. Kita dapat memahami kerumitan dari hubungan ini dalam fakta bahwa kita dapat menemukan seorang Althusserian yang termasuk dalam kategori Marxis anti-posmodern, seperti Poulantzas (2008), yang memodifikasi konsep kelas dalam rangka membebaskannya dari reduksionisme ekonomis, tetapi tanpa mengabaikan sentralitasnya sebagai subjek emansipasi; posmodernis Marxis seperti Harnecker (2010), yang menambahkan terhadap perjuangan kelas, subjek-subjek kolektif lainnya seperti "gerakan-gerakan sosial"; posmodernis Marxis sintetis seperti Balibar; dan pos-Marxis seperti Rancière atau Resnik, Wolff dan Gibson-Graham. Yang terakhir menolak kemungkinan untuk mendirikan suatu "hierarki sebab-akibat yang telah ditetapkan (*pre-ordained*)" dan suatu "hierarki penafsiran yang definitif" (Gibson-Graham et.al., 2001: 5). Dalam menolak pernyataan Marxisme yang memberikan sebuah penjelasan bagi masyarakat secara keseluruhan dan menganggapnya sebagai suatu teori mengenai kelas yang menafsirkan konflik-konflik sosial dari suatu perspektif kelas (yang secara niscaya terbatas), di mana kelas adalah "suatu fitur dari analisis partikular ketimbang suatu tatanan sosial yang terberi" (Gibson-Graham et. al., 2001:5); mereka mengabaikan hampir semua pernyataan dan aspirasi-aspirasi penjas Marxisme.

2. Istilah *posmodernisme* mencakup suatu kejamakan dari teori-teori dan praktik-praktik, yang saling berlainan satu sama lain. Namun, dari perspektif artikel ini, mereka memiliki beberapa ciri utama yang sama: ketidakpercayaan terhadap narasi-narasi besar, kritik atas konsepsi modern mengenai sejarah sebagai kemajuan, dan kritik atas sentralitas suatu subjek (bahkan kolektif) yang terpadu.

3. Harus dicatat bahwa tipologi kami berkaitan dengan suatu fenomena intelektual—pertemuan antara Marxisme dan posmodernisme—yang lahir di "Utara". Namun kami pikir bahwa juga berguna memperjelas reaksi-reaksi dari Marxisme Selatan terhadap posmodernisme. Kita dapat menemukan Marxis anti-posmodern seperti Atilio Boron, yang menolak "kekaburan dan kemandulan" pos-Marxisme dan menganggap bahwa Marxisme telah "berhasil keluar dari krisis hari ini" (Boron, 2000: 75), atau



---

Vivek Chibber (2003, 2013), yang mengkritik teori-teori poskolonial dari perspektif Marxis. Ada juga posmodernis Marxis seperti de Ipola dan Portanteiro di masa akhir mereka (1981), yang tetap dalam perspektif Marxis tetapi mengaitkannya dengan kategori-kategori lain seperti “rakyat”; atau Enrique Dussel, yang berupaya membangun suatu “filsafat pembebasan” yang berasal dari tempat mereka yang tertindas, “subjek sejarah”: kelas proletarian, tetapi juga gerakan perempuan dan “masyarakat yang secara budaya tertindas” (Dussel, 1983: 32). Posmodernis Marxis sintetis seperti Anibal Quijano (1995, 2004), yang tetap berada dalam kategori-kategori Marxis, menganalisis kecenderungan utama dari kapitalisme dan peran yang berubah dari borjuis dan proletariat, sementara berpendapat bahwa di Amerika Latin, karena heterogenitas dari hubungan-hubungan intersubjektif dan cara-cara produksi makna, terdapat proses-proses identifikasi kembali, seperti ras, etnisitas, atau rakyat yang tidak bisa dijelaskan dalam kerangka relasi antara modal dan tenaga kerja. Yang terakhir, para pemikir pos-Marxis Selatan, seperti para sarjana dari Studi Sub-altern yang lahir dari kerangka-kerangka Marxis dan Gramscian, mereka mengembangkan pendekatan-pendekatan teori pos-Marxis dan poskolonial; atau Roberto Mangabeira Unger (1987), yang mengembangkan suatu korpus teori sosial, hukum, dan ekonomi yang orisinal, mengambil dari Marx tetapi secara tajam mengkritik konsep-konsep utamanya. Kita juga tak boleh melupakan bahwa sekalipun Laclau mengembangkan pendekatan pos-Marxisnya di Inggris Raya, seluruh konseptualisasinya dipengaruhi secara kuat oleh perkembangan hidupnya, secara teoretis maupun politis, di Argentina.

4. Analisis Fraser sejalan dengan para Marxis Barat yang berusaha memasukkan tema-tema Weberian ke dalam Marxisme. Definisi Fraser tentang kelas lebih berciri Weberian ketimbang Marxis. Baginya, “mengatakan bahwa suatu masyarakat memiliki struktur kelas berarti bahwa masyarakat itu melembagakan mekanisme-mekanisme ekonomis yang secara sistematis menyangkal beberapa anggotanya dari memperoleh cara-cara dan kesempatan-kesempatan yang mereka perlukan untuk berpartisipasi secara sama dengan yang lainnya dalam kehidupan sosial” (Fraser dan Honneth, 2003: 49). Dalam definisinya, kelas tergantung pada peluang-peluang kehidupan yang berbasis-pasar daripada dalam hubungannya dengan alat-alat produksi.

5. Antonio Negri (Negri dan Hardt, 2000) telah mengajukan *multitude* (masyarakat banyak) sebagai subjek emansipatoris kontemporer. Dapat dinyatakan bahwa dia termasuk ke dalam kategori pos-Marxis dalam tipologi kami, karena dia menekankan karakter ketakterpusatan dan kejamakan *multitude*, dan dia menggabungkan dalam analisisnya konsep-konsep seperti biopolitik, yang merupakan tema sentral dalam kritik atas konseptualisasi Marxis mengenai kekuasaan. Kami tidak memasukkan Negri sebagai suatu contoh, bukan hanya karena keterbatasan ruang, tetapi juga karena kami pikir bahwa analisis yang lebih mendalam atas konsepnya menunjukkan bahwa faktanya ini sangatlah mirip dengan cara Marx dan Marxisme klasik mengkonseptualisasi proletariat. Di samping pernyataannya bahwa masyarakat banyak itu jamak, Negri secara spesifik berpendapat bahwa ia “menghasilkan dirinya sebagai suatu singularitas” dan bahwa ia adalah ‘kekuatan tunggal daru suatu kota baru’, tanpa memberikan penjelasan teoretis yang menyeluruh mengenai bagaimana seorang subjek dapat menjadi suatu ketunggalan sekaligus suatu kejamakan yang tak bisa direduksi (dalam Fumagalli et al., 2010). Lebih jauh, masyarakat banyak membentuk dirinya di dalam ranah produksi, yang digambarkan sebagai “produksi biopolitis”, dan di dalam perjuangan melawan kapital rente.

## Referensi

- Aronowitz S (2004) *How Class Works: Power and Social Movement*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Amin A (1994) *Post-Fordism: A Reader*. Oxford: Blackwell.
- Aronson R (1995) *After Marxism*. New York: The Guilford Press.
- Balibar E (1994) *Masses, Classes, Ideas: Studies on Politics and Philosophy before and after Marx*. London: Routledge.
- Boron A (2000). “Embattled legacy: ‘Post-Marxism’ and the Social and Political Legacy of Karl Marx”, *Latin American Perspectives* 27(4): 49–79.

- 
- Bourdieu P (1991) *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Polity Press.
- Boyer R (2000) "Is a financial-led growth regime a viable alternative to Fordism? A preliminary Analysis". *Economy and Society* 29(1): 111–145.
- Chibber V (2003) *Locked in Place: State-building and Late Industrialization in India*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Chibber V (2013) *Postcolonial Theory and the Specter of Capital*. London: Verso.
- De Ipola E and Portantiero J (1981), "Lo nacional-popular y los populismos realmente existentes", *Nueva Sociedad* 54: 7–18.
- Dussel E (1983) *Praxis latinoamericana y filosofia de liberacion*, [www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/96.pdf](http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/96.pdf)
- Fraser N (2008) *Adding Insult to Injury*. London: Verso.
- Fraser N and Honneth A (2003) *Redistribution or Recognition? A Political-philosophical Exchange*. London: Verso.
- Fukuyama F (1992) *The End of History and the Last Man*. New York: Free Press.
- Fumagalli A, Mezzadra S and Negri A (2010) *Crisis in the Global Economy*. Los Angeles: Semiotext(e).
- Gibson-Graham JK, Resnick S and Wolff R (eds) (2000) *Class and its Others*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Gibson-Graham JK, Resnick S and Wolff R (2001) *Toward a Post-structuralist Political Economy* In: Gibson-Graham JK, Resnick S and Wolff R (eds) *Re/presenting Class: Essays in Postmodern Marxism*. Durham, NC: Duke University Press.
- Hall S (1991) "Brave New World: The Debate about Post-Fordism", *Socialist Review* 21(1): 57–64.
- Hall S and Jacques M (eds) (1989) *New Times: The Changing Face of Politics in the 1990s*. London: Verso.
- Harnecker M (2010) *Ideas for the struggle*, <http://www.socialistproject.ca>
- Harvey D (1982) *The Limits to Capital*. Oxford: Blackwell.
- Harvey D (2003) *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.
- Harvey D (2005) *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Hindess B and Hirst P (1977) *Mode of Production and Social Formation*. London: Palgrave Macmillan.
- Hirsh J (1988) "The Crisis of Fordism, transformation of the Keynesian security state and new social movements". *Conflicts and Change* 10: 43–55.
- Holloway J (2005) *Change the World Without Taking Power*. London: Pluto Press.
- Huntington S (1993) *The Third Wave: Democratization in the Late 20th Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Jessop B (2002) *The Future of the Capitalist State*. Malden, MA: Polity.
- Laclau E (1996) *Emancipations*. London: Verso.
- Laclau E (2005) *On Populist Reason*. London: Verso.
- Laclau E (2006), "Why constructing a people is the main task of radical politics", *Critical Inquiry* 32(4): 646–680.
- Laclau E and Mouffe C (1985) *Hegemony and Socialist Strategy*. London: Verso.
- Lockman Z (2009) *Contending Visions of the Middle East: The History and Politics of Orientalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Liotard JF (1979) *The Postmodern Condition*. Manchester: Manchester University Press.
- Mangabeira Unger R (1987) *Politics, a Work in Constructive Social Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Negri A and Hardt M (2000) *Empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Quijano A (1995) *El Marxismo de Mariategui*. In: Alcazar D (ed.) *El Marxismo de Jose Carlos Mariategui*. Lima: Amauta.
- Quijano A (2004) *El laberinto de America Latina*. *Revista Venezolana de Economia y Ciencias Sociales* 10: 75–97.
- Poulantzas N (2008) *The Poulantzas Reader*. London: Verso.
- Rancière J (1999) *Disagreement: Politics and Philosophy*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

---

Rosenau P (1992) *Posmodernism and the Social Sciences*. Princeton, NJ: Princeton University Press.  
Sim S (2000) *Post-Marxism: An Intellectual History*. London: Routledge.  
Wright E (1985) *Classes*. London: Verso.  
Wright E (2005) *Approaches to Class Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.

### Biografi Penulis

**Dani Filc, MD, PhD** adalah professor pembantu di Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Ben-Gurion. Dia adalah anggota inti dari Pusat Studi Ketidaksetaraan Adva dan dulunya merupakan kepala dari Fisikawan untuk Kemanusiaan – Israel. Di antara publikasinya adalah buku *The Power of Property: Israel in the Globalization Age*, diedit bersama Uri Ram (Institut Van Leer, 2004, dalam bahasa Ibrani); *Hegemony and Populism in Israel* (Resling, 2006, dalam bahasa Ibrani); *Circles of Exclusion: The Politics of Health-Care in Israel* (Universitas Cornell, 2009); dan *The Political Right in Israel* (Routledge, 2009). Di antara artikel yang diterbitkan dalam jurnal yang dirujuk adalah: 'Post-populism: Explaining neo-liberal populism through the populist habitus', *Journal of Political Ideologies* 2011, 16: 221-238; (bersama Gottlieb dan N Davidovich) 'Medical humanitarianism, human rights and political advocacy: The case of the Israeli open clinic', *Social Science and Medicine* 2012, 6: 839-835; 'Limitations of the liberal approach in bio-ethics in Israel', *Medicine and Law* 2013, 1: 64-70 (dalam bahasa Ibrani); 'Neo-Liberalism and the health business: The case of Israel', *Critical Social Policy* 2005, 25 (2): 180-197; 'The National Unity Party: From Messianic nationalism to radical right populism', *Mediterranean Politics* 2005, 10(1): 85-97; dan 'The contradictory trends of health commodification in Israel', *Journal of Social Policy* 2004, 33(3): 417-436.

**Uri Ram** adalah professor di Departemen Sosiologi dan Antropologi di Universitas Ben-Gurion. Dia adalah anggota pendiri utama dari Pusat Studi Ketidaksetaraan Adva. Dia adalah lulusan dari Mazhab Baru Penelitian Sosial, dan merupakan professor tamu rutin di sana. Saat ini dia adalah professor tamu di Pusat Studi Israel Taub di Universitas New York. Dia adalah anggota dari kepala editorial *Constellations; International Journal of Politics, Culture and Society*, dan *Theory and Criticism*. Ram adalah pengarang dalam penerbitan isu-isu nasionalisme, memori kolektif, sosiologi pengetahuan, sosiologi politik, globalisasi, dan teori sosiologis. Bukunya termasuk: *Israeli Nationalism: Social Conflicts and the Politics of Knowledge* (Routledge, 2011); *The Time of the 'Post': Nationalism and the Politics of Knowledge in Israel* (Resling, 2006); *The Globalization of Israel: McWorld on Tel Aviv, Jihad in Jerusalem* (Resling, 2005; Routledge, 2007); *The Changing Agenda of Israeli Sociology: Theory, Ideology and Identity* (SUNY Press, 1995); *The Power of Property: Israeli Society in Global Era* (co-editor; Van Leer and HaKibbutz HaMeuchad, 2004); *Israelis in Conflict: Hegemonies, Identities and Challenges* (co-editor; Sussex Academic Press, 2004) dan *In/Equality* (co-editor; Ben-Gurion University Press and Bialik Press, 2006).

---

*Artikel ini disebarakan secara swadaya oleh blog independen dan nirlaba Jurnal Sosialis untuk kepentingan kajian, pergerakan, dan pencerdasan inteligensi kolektif.*